



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA
SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 40);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 17);
 12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rekening Kas Lembang adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Jumlah Lembang adalah jumlah Lembang yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBLEmbang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG

Pasal 2

Rincian Dana Lembang setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Lembang sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Lembang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Lembang} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

$AA_{Kab/kota}$	= Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019
DST	= Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Lembang Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Lembang.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Lembang Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Lembang.
- (5) Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Lembang Tertinggal dan Lembang Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Lembang

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Lembang terhadap total penduduk Lembang.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Lembang terhadap total luas wilayah Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- Z4 = rasio IKG setiap Lembang terhadap IKG Lembang Kabupaten Toraja Utara.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Lembang untuk setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA LEMBANG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Lembang (RKL).
- (2) Pemindahbukuan dari RKDU ke RKL dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana Lembang diterima di RKL setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan

Lembang mengenai APB Lembang.

- (4) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya dari Kepala lembang.
- (5) Penyaluran Dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sampai dengan tahap II dari Kepala Lembang.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Lembang dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA LEMBANG

Pasal 10

- (1) Dana Lembang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas bidang produk unggulan lembang, kawasan perdesaan, BUMLem, embung dan sarana olahraga Lembang (sesuai prioritas

yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

- (2) Dana Lembang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Lembang mengenai APBLembang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Lembang diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Lembang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Lembang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Lembang.

BAB V

PELAPORAN DANA LEMBANG

Pasal 13

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Lembang sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Lembang dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Lembang apabila:
- belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5);
 - terdapat sisa dana desa di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - terdapat usulan dari aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Lembang tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya,
- (3) Dalam hal Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Lembang yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Lembang tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni

Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Lembang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Lembang.
- (6) Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Lembang.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Lembang yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Lembang di RKL tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Lembang tidak dapat disalurkan lagi ke RKL dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Lembang.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Lembang yang bersangkutan mengenai Dana Lembang yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Lembang telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Lembang tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Lembang paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Lembang dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Lembang di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Setiap Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

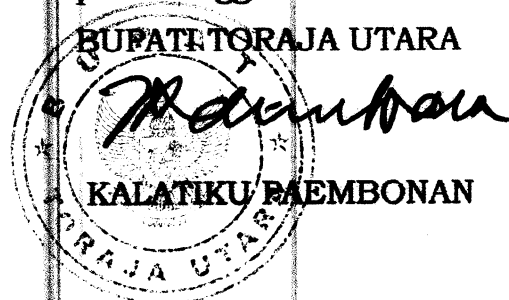
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI TORAJA UTARA



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 65 TAHUN 2019 TANGGAL 18 DESEMBER 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG
DI KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBANG
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
I	KECAMATAN SOPAI				
1	Tombang Langda	662,806,000	181,289,000	266,173,000	1,110,268,000
2	Langda	662,806,000	-	337,932,000	1,000,738,000
3	Nonongan Selatan	662,806,000	-	329,412,000	992,218,000
4	Marante	662,806,000	181,634,000	370,573,000	1,215,013,000
5	Salu Sopa	662,806,000	181,634,000	277,856,000	1,122,296,000
6	Salu Sarre	662,806,000	181,634,000	312,137,000	1,156,577,000
7	Salu	662,806,000	181,634,000	756,788,000	1,601,228,000
	Jumlah I	4,639,642,000	907,825,000	2,650,871,000	8,198,338,000
II	KECAMATAN KESU'				
1	Sangbua'	662,806,000	-	187,424,000	850,230,000
2	Tadongkon	662,806,000	-	289,771,000	952,577,000
3	Angin Angin	662,806,000	181,634,000	404,819,000	1,249,259,000
4	Tallu Lolo	662,806,000	-	255,012,000	917,818,000
5	Rinding Batu	662,806,000	-	306,667,000	969,473,000
	Jumlah II	3,314,030,000	181,634,000	1,443,693,000	4,939,357,000
III	KECAMATAN SANGGALANGI				
1	Tallung Penanian	662,806,000		354,129,000	1,016,935,000
2	Pata'padang	662,806,000		467,163,000	1,129,969,000
3	Buntu La'bo'	662,806,000	181,634,000	413,041,000	1,257,481,000
4	Tandung La'bo'	662,806,000	181,634,000	446,151,000	1,290,591,000
5	La'bo'	662,806,000	181,634,000	520,389,000	1,364,829,000
	Jumlah III	3,314,030,000	544,902,000	2,200,873,000	6,059,805,000
IV	KECAMATAN BUNTAO'				
1	Sapan Kua-Kua	662,806,000	181,634,000	295,360,000	1,139,800,000
2	Misa Ba'bana	662,806,000	181,634,000	313,656,000	1,158,096,000
3	Rinding Kila' Balabatu	662,806,000	181,634,000	568,256,000	1,412,696,000
4	Issong Kalua	662,806,000	181,634,000	534,518,000	1,378,958,000
	Jumlah IV	2,651,224,000	726,536,000	1,711,790,000	5,089,550,000
V	KECAMATAN RANTEBUA				
1	Rantebua Sanggalangi	662,806,000	363,269,000	545,022,000	1,571,097,000
2	Rantebua Sumalu	662,806,000	181,634,000	407,187,000	1,251,627,000
3	Rantebua	662,806,000	181,634,000	458,205,000	1,302,645,000
4	Makkuan Pare	662,806,000	181,634,000	315,367,000	1,159,807,000
5	Pitung Penanian	662,806,000	181,634,000	412,940,000	1,257,380,000
	Jumlah V	3,314,030,000	1,089,805,000	2,138,721,000	6,542,556,000
VI	KECAMATAN NANGGALA				
1	Rante	662,806,000	181,634,000	239,862,000	1,084,302,000
2	Karre Penanian	662,806,000	181,634,000	340,894,000	1,185,334,000
3	Karre Limbong	662,806,000	181,634,000	392,066,000	1,236,506,000
4	Nanna Nanggala	662,806,000	181,634,000	290,183,000	1,134,623,000
5	Basokan	662,806,000	181,634,000	308,404,000	1,152,844,000
6	Nanggala	662,806,000	181,634,000	313,310,000	1,157,750,000
7	Tandung Nanggala	662,806,000	181,634,000	268,860,000	1,113,300,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBAH
8	Lili' Kira'	662,806,000	-	235,590,000	898,396,000
	Jumlah VI	5,302,448,000	1,271,438,000	2,389,169,000	8,963,055,000
VII	KECAMATAN TONDON				
1	Tondon	662,806,000	181,634,000	535,343,000	1,379,783,000
2	Tondon Matallo	662,806,000	181,634,000	641,454,000	1,485,894,000
3	Tondon Langi	662,806,000	181,634,000	516,385,000	1,360,825,000
4	Tondon Siba'ta	662,806,000	181,634,000	500,969,000	1,345,409,000
	Jumlah VII	2,651,224,000	726,536,000	2,194,151,000	5,571,911,000
VIII	KECAMATAN TALLUNGLIPU				
1	Buntu Tallunglipu	662,806,000	-	264,536,000	927,342,000
	Jumlah VIII	662,806,000	-	264,536,000	927,342,000
IX	KECAMATAN RANTEPAO				
1	Saloso	662,806,000	-	337,271,000	1,000,077,000
2	Limbong	662,806,000	-	261,950,000	924,756,000
	Jumlah IX	1,325,612,000	-	599,221,000	1,924,833,000
X	KECAMATAN TIKALA				
1	Sereale	662,806,000	181,634,000	304,976,000	1,149,416,000
2	Buntu Batu	662,806,000	181,634,000	318,224,000	1,162,664,000
3	Embatau	662,806,000	181,634,000	429,354,000	1,273,794,000
4	Benteng Ka'do To'ria	662,806,000	181,634,000	286,711,000	1,131,151,000
5	Pangden	662,806,000	181,634,000	298,200,000	1,142,640,000
	Jumlah X	3,314,030,000	908,170,000	1,637,465,000	5,859,665,000
XI	KECAMATAN SESEAN				
1	Buntu Lobo'	662,806,000	181,634,000	469,751,000	1,314,191,000
2	Parinding	662,806,000	181,634,000	292,601,000	1,137,041,000
3	Bori Rante Letok	662,806,000	181,634,000	315,760,000	1,160,200,000
4	Bori' Lombongan	662,806,000	-	214,772,000	877,578,000
	Jumlah XI	2,651,224,000	544,902,000	1,292,884,000	4,489,010,000
XII	KECAMATAN BALUSU				
1	Palangi'	662,806,000	181,634,000	308,303,000	1,152,743,000
2	Karua	662,806,000	181,634,000	300,347,000	1,144,787,000
3	Lilikira Ao'gading	662,806,000	181,634,000	394,845,000	1,239,285,000
4	Balusu Bangun Lipu	662,806,000	181,634,000	561,440,000	1,405,880,000
5	Awak Kawasik	662,806,000	-	186,730,000	849,536,000
	Jumlah XII	3,314,030,000	726,536,000	1,751,665,000	5,792,231,000
XIII	KECAMATAN SA'DAN				
1	Sa'dan Andulan	662,806,000	181,634,000	278,615,000	1,123,055,000
2	Sa'dan Tiroallo	662,806,000	181,634,000	444,670,000	1,289,110,000
3	Sangkaropi	662,806,000	181,634,000	442,396,000	1,286,836,000
4	Sa'dan Pebulian	662,806,000	181,634,000	361,553,000	1,205,993,000
5	Sa'dan Ballo Pasange	662,806,000	181,634,000	396,768,000	1,241,208,000
6	Sa'dan Likulambe'	662,806,000	363,269,000	548,933,000	1,575,008,000
7	Sa'dan Pesondongan	662,806,000	363,269,000	558,703,000	1,584,778,000
8	Sa'dan Ulusalu	662,806,000	363,269,000	874,781,000	1,900,856,000
	Jumlah XIII	5,302,448,000	1,997,977,000	3,906,419,000	11,206,844,000
XIV	KECAMATAN BANGKELEKILA'				
1	Toyasa Akung	662,806,000	181,634,000	276,772,000	1,121,212,000
2	Batu Limbong	662,806,000	181,634,000	442,119,000	1,286,559,000
3	Bangkelekila	662,806,000	-	257,726,000	920,532,000
4	Tampan Bonga	662,806,000	181,634,000	348,285,000	1,192,725,000
	Jumlah XIV	2,651,224,000	544,902,000	1,324,902,000	4,521,028,000
XV	KECAMATAN SULOARA'				
1	Tonga Riu	662,806,000	181,634,000	352,402,000	1,196,842,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBAANG
2	Landorundun	662,806,000	181,634,000	215,494,000	1,059,934,000
3	Suloara	662,806,000	181,634,000	558,185,000	1,402,625,000
4	Sesean Matallo	662,806,000	181,634,000	304,456,000	1,148,896,000
5	Lempo	662,806,000	181,634,000	330,693,000	1,175,133,000
	Jumlah XV	3,314,030,000	908,170,000	1,761,230,000	5,983,430,000
XVI	KECAMATAN KAPALAPITU				
1	Benteng Mamullu	662,806,000	181,634,000	400,677,000	1,245,117,000
2	Kapalapitu	662,806,000	-	263,257,000	926,063,000
3	Kantun Poya	662,806,000	181,634,000	345,900,000	1,190,340,000
4	Benteng Ka'do	662,806,000	181,634,000	458,893,000	1,303,333,000
5	Sikuku'	662,806,000	181,634,000	350,598,000	1,195,038,000
6	Polo Padang	662,806,000	181,634,000	295,505,000	1,139,945,000
	Jumlah XVI	3,976,836,000	908,170,000	2,114,830,000	6,999,836,000
XVII	KECAMATAN DENPINA				
1	Kapolang	662,806,000	181,634,000	439,879,000	1,284,319,000
2	Piongan	662,806,000	181,634,000	351,986,000	1,196,426,000
3	Dende	662,806,000	181,634,000	440,439,000	1,284,879,000
4	Paku	662,806,000	181,634,000	329,751,000	1,174,191,000
5	Ma'dong	662,806,000	181,634,000	365,048,000	1,209,488,000
6	Buntu Tagari	662,806,000	181,634,000	475,561,000	1,320,001,000
7	Parinding	662,806,000	181,634,000	380,609,000	1,225,049,000
	Jumlah XVII	4,639,642,000	1,271,438,000	2,783,273,000	8,694,353,000
XVIII	KECAMATAN AWAN RANTEKARUA				
1	Batu Lotong	662,806,000	363,269,000	563,746,000	1,589,821,000
2	Awan	662,806,000	181,634,000	388,960,000	1,233,400,000
3	Londong Biang	662,806,000	181,634,000	634,531,000	1,478,971,000
4	Buntu Karua	662,806,000	181,634,000	697,825,000	1,542,265,000
	Jumlah XVIII	2,651,224,000	908,171,000	2,285,062,000	5,844,457,000
XIX	KECAMATAN RINDINGALLO				
1	Buntu Batu	662,806,000	181,634,000	379,774,000	1,224,214,000
2	Ampang Batu	662,806,000	181,634,000	387,962,000	1,232,402,000
3	Mai'ting	662,806,000	-	273,087,000	935,893,000
4	Lo'ko Uru Tanete Batu	662,806,000	181,634,000	383,738,000	1,228,178,000
5	Rindingallo	662,806,000	181,634,000	444,283,000	1,288,723,000
6	Bulu Langkan	662,806,000	181,634,000	475,489,000	1,319,929,000
7	Lempo Poton	662,806,000	181,634,000	379,774,000	1,224,214,000
	Jumlah XIX	4,639,642,000	1,089,804,000	2,724,107,000	8,453,553,000
XX	KECAMATAN BUNTU PEPASAN				
1	Parandangan	662,806,000	-	310,116,000	972,922,000
2	Buntu Minanga	662,806,000	181,634,000	329,071,000	1,173,511,000
3	Sarambu	662,806,000	181,634,000	445,336,000	1,289,776,000
4	Rante Uma	662,806,000	181,634,000	387,621,000	1,232,061,000
5	Pulu'-Pulu'	662,806,000	181,634,000	547,135,000	1,391,575,000
6	Pengkaroan Manuk	662,806,000	181,634,000	355,916,000	1,200,356,000
7	Batu Busa	662,806,000	181,634,000	346,005,000	1,190,445,000
8	Roroan Barra'-Barra'	662,806,000	181,634,000	354,579,000	1,199,019,000
9	Pangkung Batu	662,806,000	181,634,000	406,315,000	1,250,755,000
10	Ponglu	662,806,000	363,269,000	450,294,000	1,476,369,000
11	Paongan	662,806,000	181,634,000	394,560,000	1,239,000,000
12	Talimbangan	662,806,000	181,634,000	474,019,000	1,318,459,000
	Jumlah XX	7,953,672,000	2,179,609,000	4,800,967,000	14,934,248,000
XXI	KECAMATAN BARUPPU'				
1	Benteng Batu	662,806,000	181,634,000	614,478,000	1,458,918,000
2	Baruppu' Utara	662,806,000	181,634,000	572,501,000	1,416,941,000

NO	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA LEMBAH
3	Baruppu' Parodo	662,806,000	181,634,000	855,192,000	1,699,632,000
	Jumlah XXI	1,988,418,000	544,902,000	2,042,171,000	4,575,491,000
	TOTAL	73,571,466,000	17,981,427,000	44,018,000,000	135,570,893,000

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKA PAEMBONAN